

**TIDAK ADA MAFIA HUTAN
DALAM ARAHAN PRESIDEN KEPADA POLRI**



Aku hendak berbagi cerita “Aku, Buku, dan Secuil Perlawanan” sambil seruput kopi hangat, sedapnye roti canai, tentu dengan anda, kenalan atau sahabat saya. Ceritanya bisa pendek. Bisa panjang. Sahabat. menulishlah, seolah-olah esok pagi kau mati! Whizzzzzzzzzz, saatnya ngupi!

www.madealikade.wordpress.com

Made Ali, SH

Koordinator Jikalahari 2021-2024
www.jikalahari.or.id

Alumni Fakultas Hukum Unri



divisihumaspolri



Facebook: DIVISI HUMAS POLRI | Instagram: DIVISIHUMASPOLRI | TikTok: DIVHUMAS_POLRI | Twitter: @DIVHUMAS_POLRI



5 ARAHAN PRESIDEN JOKOWI KEPADA PIMPINAN POLRI DI SELURUH INDONESIA!

1. Polri harus solid dan berjuang melakukan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Harus responsif terhadap keluhan masyarakat, respon cepat dan memiliki *sense of crisis* di tengah situasi yang sedang sulit.
2. Melakukan perbaikan dan bertindak tegas terhadap hal yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, mulai dari gaya hidup hingga pelanggaran anggota Polri.
3. Tegas dalam pemberantasan judi *online*, pemberantasan narkoba, serta hal lain yang mengganggu dan meresahkan masyarakat.
4. Mengawal kebijakan ekonomi pemerintah di setiap tingkat, hingga tingkat provinsi dan kabupaten dalam menghadapi situasi global saat ini.
5. Mampu melakukan aksi pencegahan dan tindakan tegas terhadap tindakan masyarakat yang memicu perpecahan, polarisasi, dan hal lain yang mengganggu kehidupan masyarakat dalam menghadapi tahun-tahun politik yang dimulai saat ini.

Keterangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai bertemu Presiden | Jumat, 14 Oktober 2022



Memberantas Mafia Hutan?



Perilaku 'Jenderal Sambo' dan 'Jenderal Teddy' membuka mata kita: pangkat jenderal punya kekuatan melakukan apa saja termasuk membunuh, anak buah pun rela menuruti perintah, bahkan untuk menghilangkan nyawa. Bahkan mengganti barang bukti narkoba dengan tawas.

Perbuatan 'Jenderal Sambo' dan 'Jenderal Teddy' sesungguhnya hal biasa di institusi Polri?



ADA 'JENDERAL SAMBO' DALAM PENGHENTIAN PERKARA ILLOG DAN KARHUTLA DI RIAU

- Jikalahari dukung Kapolri Listyo Sigit kembalikan personil polisi baik yang pernah membongkar perkara pembalakan liar dan Karhutla di Riau melibatkan para taipan dan korporasinya.
- Upaya ini untuk kembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri yang ternoda karena kasus Jenderal Sambo.
- Perbuatan 'Jenderal Sambo' sesungguhnya hal biasa di institusi Polri. Temuan Jikalahari Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berasal dari perintah jenderal kepada penyidik.
- Padahal para penyidik perkara illog 2005 – 2007 dan karhutla 2019 bertungkus lumus, siang malam, 24 jam, bahkan berbulan-bulan kumpulkan bukti, keluar masuk hutan, menghirup asap, menginjak tanah gambut yang terbakar, meninggalkan anak istri dan makan seadanya di lapangan.

Perilaku 'Jenderal Sambo' membuka mata kita: pangkat jenderal punya kekuatan melakukan apa saja termasuk membunuh, anak buah pun rela menuruti perintah, bahkan untuk menghilangkan nyawa. Bahkan 'skenario' yang mengada-ada tidak bisa diurai dengan jelas oleh institusi sekelas Polri.

“ Kasus Jenderal Sambo tunjukkan kekuatan seorang jenderal bisa memerintahkan anak buahnya untuk membunuh sekalipun, apalagi hanya hentikan kasus. Anak buah yang sudah berjuang mati-matian mengumpulkan alat bukti pasrah dengan perintah. Padahal mereka polisi terbaik diantara 430 ribu personil Polri se-Indonesia,

*Made Ali
Koordinator Jikalahari*



- Pada 2001 – 2006, Kapolda Riau Brigjen Sutjiptadi membongkar kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutana (illegal logging), pada Juni 2007 Polda Riau mulai lakukan penyidikan.
- Polda Riau bergerak cepat, periksa puluhan saksi, pelapor, menyita dan mengamankan 133 eksavator dan ribuan log kayu.
- Polda Riau tetapkan sekitar 200 tersangka dari 14 perusahaan HTI di Riau milik APP dan APRIL: 7 perusahaan afiliasi PT Riau Andalan Pulp and Paper (Raja Garuda Mas/APRIL) dan sisanya afiliasi PT Indah Kiat Pulp and Paper (Sinar Mas Groups/APP).
- Lalu, pada Desember 2008, Brigjen Hadiatmoko pengganti Kapolda Sutjiptadi mengejutkan masyarakat Riau dengan menerbitkan SP3 terhadap 14 korporasi yang terlibat dalam pembalakan liar di Riau.
- Sepanjang Januari – November 2015, Rakyat Riau hirup polusi asap karhutla. Polda Riau tetapkan 18 korporasi tersangka terlibat karhutla, 15 korporasi ini terafiliasi dengan khusus HTI APP dan APRIL
- Pada 21 Maret 2016, Alm Supriyanto dilantik menjadi Kapolda Riau gantikan Dolly Bambang Hermawan. Setelah dilantik, Alm Brigjen Supriyanto langsung terbitkan SP3 untuk 12 dari 18 korporasi yang telah dilakukan penyidikan. Sebelumnya 3 perusahaan sudah di SP3 saat Kapolda Riau masih dipimpin oleh Brigjen Dolly.



*Made Ali
Koordinator Jikalahari*



Hanya pemerintah kapolri yang bisa membuka SP3 ini atau melanjutkan penyidikannya. Persis seperti kasus 'Jenderal Sambo' perkara jenderal hanya bisa dilawan oleh jenderal pula

*Made Ali
Koordinator Jikalahari*

- Kapolri dalam arahannya, Jumat 19 Agustus 2022 bertekad kembalikan kepercayaan publik pada institusi polri berupa memerangi perjudian, narkoba, illegal mining dan pungli



Kapolri juga harus masuk kasus sektor SDA. Buka SP3 illog dan karhutla, bukan saja kembalikan kepercayaan publik, jauh dari itu, memulihkan ruang ekologis dan kembalikan hutan tanah masyarakat adat yang dirampas korporasi. Personil personil yang baik itu pernah menyidik atau membongkar kasus illog dan karhutla, namun dihentikan oleh jenderal bintang. Kembalikan mereka untuk perjuangan kebaikan yang mereka lakukan

TEMUAN LAPANGAN DI AREAL 20 KORPORASI TERLIBAT KORUPSI KEHUTANAN

Temuan lapangan hasil investigasi EoF dan Jikalahari sepanjang 2008 - 2019 di areal 20 korporasi terlibat korupsi kehutanan menemukan:

Jikalahari



3

PERUSAHAAN

Melakukan pembukaan/
penebangan hutan alam
yaitu:

- PT Triomas FDI (Mei - Des 2013 dan Oktober 2017)
- PT Satria Perkasa Agung (Juni 2012)
- PT Rimba Mandau Lestari (Desember 2009)

4

PERUSAHAAN

Areal konsesinya terbakar
pada 2014 - 2016 yaitu:

- PT Triomas FDI
- PT Seraya Sumber Lestari
- PT Satria Perkasa Agung
- CV Putri Lindung Bulan

20

PERUSAHAAN

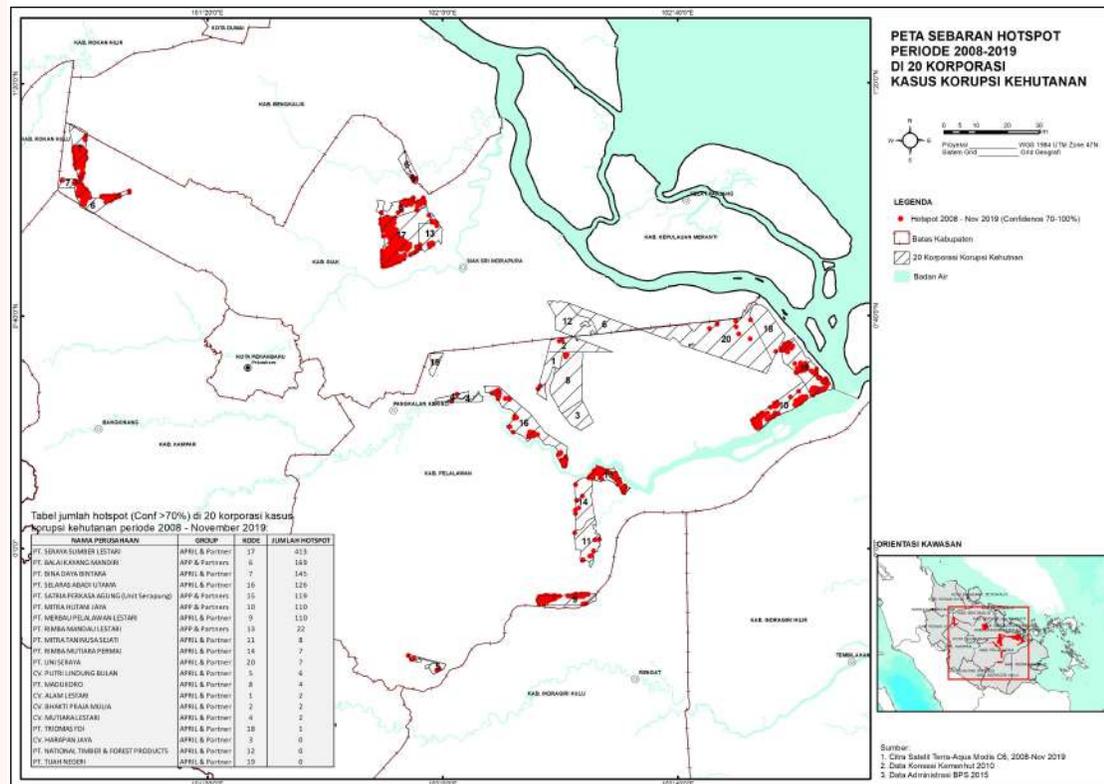
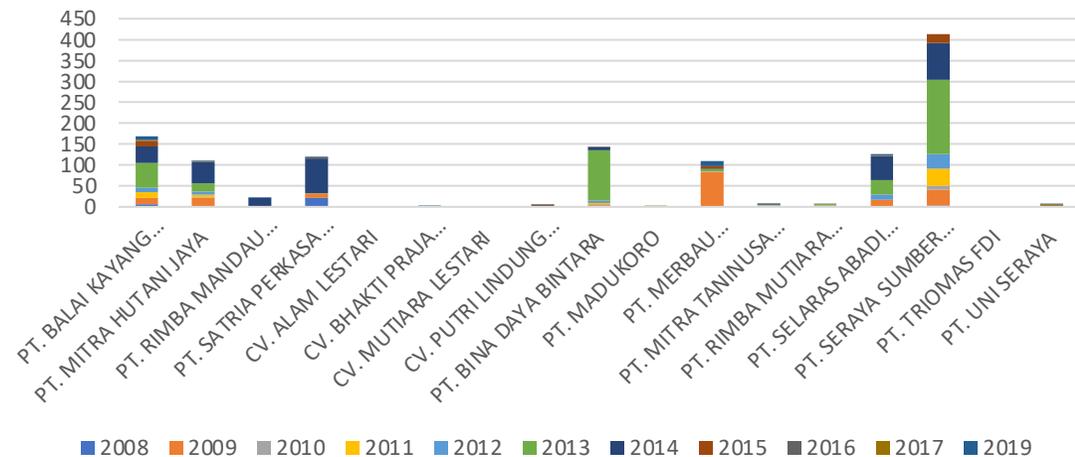
Terjadi deforestasi
besar-besaran di seluruh
areal korporasi yang
terlibat dalam korupsi
perizinan kehutanan di
Riau

DEFORESTASI > 60 RIBU HA

Sepanjang 2013 - 2018
Setara dengan

LUAS PROVINSI DKI JAKARTA

GRAFIK JUMLAH HOTSPOT PADA 20 KORPORASI KASUS KORUPSI
KEHUTANAN
PERIODE 2008 - 2019



Korupsi Perizinan Hutan dan Lahan

- KPK OTT **Sударso (GM PT AA)**, Paino (SM PT AA), Yuda dan Juang (supir PT AA)
- Tak berapa lama, **Andi Putra Bupati Kuansing** ditetapkan tersangka suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit PT AA
- Rp 2 Milyar teken 20 persen HGU Kebun Masyarakat



- Gubernur Riau ANNAS MAMUN di OTT KPK
- AM terima Rp 3 dari 8 M dari Darmex Agro (Sawit) alih fungsi dari KH jadi non KH dalam revisi RTRWP Riau
- Sawit dalam KH: GM 1.214 ha, Marudut 120 ha



KPK tetapkan: **PT Palma Satu, Suheri Tirta, Surya Darmadi (owner Darmex Agro)**, tersangka korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.



- TAJ tersangka KPK).
- Korupsi bersama 20 korporasi HTI

Arwin AS, Asral Rachman, Syuhada Tasman, Burhanuddin Husin dan Rusli Zainal, korupsi bersama-sama 20 korporasi HTI

20 korporasi HTI masuk di Penindakan KPK. Setelah 10 tahun lebih kasusnya ditangani KPK.

Korupsi Perizinan 13 Tahun Terakhir:

- **Kehutanan:** IUPHHK HT, Pelepasan Kawasan Hutan melalui revisi RTRWP dan Sawit dalam KH
- **Perkebunan:** Perpanjangan HGU 20 persen bangun kebun masyarakat
- **Pertanahan:** korupsi perpanjangan HGU mulai terkuak



Pada Januari 2022, EoF melakukan investigasi kegiatan dua pemasok kayu APP di Riau, yakni PT Arara Abadi dan PT Sekato Pratama Makmur

EoF: menemukan penebangan vegetasi alam dan perluasan hutan tanaman industri (HTI) dilakukan oleh PT Arara Abadi dan PT Sekato Pratama Makmur di dalam Cagar Biosfir UNESCO Giam Siak Kecil – Bukit Batu, dengan tindakan yang dipertanyakan secara hukum. Area juga merupakan habitat gajah Sumatera dan memiliki gambut dalam.

PT Arara Abadi, merupakan anak grup APP Sinarmas, mendapatkan izin IUPHHK HTI dari Menteri Kehutanan berdasarkan SK No 743/Kpts-II/1996 seluas 370.435,83 ha. Sedangkan Blok Siak seluas 96.543,78 ha.

Di lapangan tim menemukan:

1. PT AA menebangi vegetasi alam di area NKT1 dari habitat gajah Sumatera dan cagar UNESCO
2. PT AA menanam akasia di area NKT1

PT Sakato Pratama Makmur, merupakan anak grup APP Sinarmas, mendapatkan izin IUPHHK HTI dari Menteri Kehutanan berdasarkan SK No 366/Kpts-II/2003 seluas 46.137,66 ha.

Di lapangan tim menemukan:

1. PT SPM menebangi hutan alam dan veteasi alam lainnya.
2. PT SPM menanam akasia di gambut dengan kedalaman lebih 4 meter.

Foto 1. Tumpukan kayu alam (*stacking*) berupa pohon-pohon yang berdiameter lebih dari 15 cm ditemukan di konsesi PT Arara Abadi. Foto diambil pada koordinat N0°57'7.85" E101°40'45.33" tanggal 16 Januari 2022 ©Eyes on the Forest 2022.





Foto 2. Jejak kaki gajah yang ditemukan di lokasi investigasi PT Arara Abadi pada lokasi 1 di peta 1. Foto diambil pada titik koordinat N0°57'13.85" E101°40'49.79" tanggal 16 Januari 2022 ©Eyes on the Forest 2022.



Foto 3. Sisa tegakan pohon kayu alam dan satu unit ekskavator kecil yang berada di lokasi bukaan hutan alam. Keberadaan pohon kayu alam yang segelintir ini di masa depan tentu jadi pertanyaan, di tengah-tengah dominasi akasia. Foto diambil pada titik koordinat $N0^{\circ}56'26.73''$ $E101^{\circ}40'4.43''$ diambil tanggal 16 Januari 2022. ©Eyes on the Forest 2022.

Foto 4. Areal luas setelah pembukaan dengan tumpukan pohon tumbang di PT SPM diambil di lokasi pada titik koordinat N1°23'24.67" E101°55'34.95". foto diambil pada tanggal 16 Januari 2022. ©Eyes on the Forest 2022.





Foto diambil pada 9 Agustus 2022 pukul 13.20 WIB menggunakan drone.
Foto: Jikalahari



Foto diambil pada 9 Agustus 2022 pukul 13.20 WIB menggunakan drone.
Foto: Jikalahari

Tiga Banner Balon udara di halaman Kantor Gubernur Riau peringatan Hari Jadi Provinsi Riau ke 65 tahun. Dua diantaranya tertulis logo APP Sinarmas Group dan APRIL Group dan APR.

Tiga Banner Balon udara di halaman Kantor Gubernur Riau peringatan Hari Jadi Provinsi Riau ke 65 tahun. Dua diantaranya tertulis logo APP Sinarmas Group dan APRIL Group dan APR.



Foto diambil pada 9 Agustus 2022 pukul 13.20 WIB menggunakan drone.
Foto: Jikalahari



Foto diambil pada 9 Agustus 2022 pukul 13.20 WIB menggunakan drone.
Foto: Jikalahari

RIAU UNGGUL UNTUK KORPORASI APP DAN APRIL, BUKAN UNTUK RAKYAT RIAU?

Jikalahari menilai Hari Jadi Provinsi Riau ke 65 Tahun dengan tagline Riau Unggul telah dinodai dengan pemasangan balon banner ucapan tahniah hari jadi Provinsi Riau berlogo APRIL dan APP, korporasi perusak hutan Riau di halaman kantor Gubernur Riau.



Mengapa hanya ucapan selamat dari APP dan APRIL yang dipajang di banner balon ucapan tersebut?

APP dan APRIL adalah perusahaan yang merusak hutan alam Riau dengan cara menyuap Bupati, Tiga Kepala Dinas Kehutanan hingga Gubernur Riau untuk dapatkan IUPHHK-HT dan RKT.

Berapa yang mereka bayar ke Pemprov Riau?

Gubri Syamsuar dan Kadis LHK Maamun Murod juga diam-diam terbitkan izin lingkungan pengembangan PT Asia Pasific Rayon (APR) yang bahayakan masyarakat dan cederai komitmen Riau Hijau.

Siapa yang mengizinkan banner itu di pajang di halaman Kantor Gubernur, langsung dari Syamsuar atau dari PNS di lingkungan Pemprov Riau?

Belajar dari kejadian sebelumnya, jelas ada maksud tersembunyi dari APP dan APRIL.

“Harusnya ini disadari oleh Syamsuar dan seluruh jajarannya. Apalagi Gubri sudah terbitkan peraturan mengatasi soal benturan kepentingan yang tujuannya untuk mencegah korupsi

Okto Yugo Setiyo
Wakil Koordinator Jikalahari.

Pada 11 Februari 2021, Syamsuar terbitkan Pergub Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Provinsi Riau.

Peraturan ini diterbitkan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di pemerintahan Provinsi Riau. Tujuannya demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Benturan kepentingan adalah kondisi yang membuat pertimbangan pribadi dapat mempengaruhi dan dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Hal ini dapat mengarah pada lahirnya kebijakan dengan kualitas 'rendah', tidak akuntabel hingga menguntungkan salah satu pihak yang memiliki kepentingan.

“

Jikalahari menemukan ada 3 bentuk benturan kepentingan yang 'diciptakan' Syamsuar karena terbuka dengan perusahaan perusak hutan di Riau.

Okto Yugo Setiyo
Wakil Koordinator Jikalahari.

(1) Situasi yang menyebabkan pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.

Poin (2) Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Poin (7) Situasi di mana keputusan/ kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.

“Benturan kepentingan ini jelas akan mempengaruhi independensi dan objektivitas Gubernur Riau dalam menerbitkan kebijakan berkaitan dengan APP dan APRIL Group,”

Okto Yugo Setiyo
Wakil Koordinator Jikalahari.

Di tengah hari jadi Prov Riau ke 65, apakah hanya 'orang kaya' yang logonya boleh ditampilkan dalam balon banner tersebut?

Mengapa tidak semua masyarakat diberi ruang untuk menampilkan ucapan mereka di balon banner untuk tahniah Provinsi Riau?

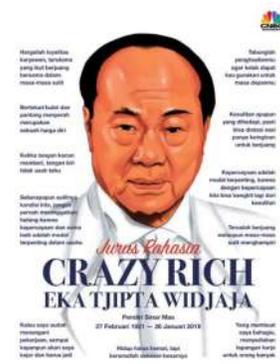
Jikalahari mendesak Syamsuar hari ini menurunkan balon banner bergambar logo APP dan APRIL. Dan untuk tahun berikutnya, tidak boleh ada lagi keistimewaan untuk APP dan APRIL maupun perusahaan yang merusak hutan alam, merampas hutan tanah masyarakat hingga membunuh flora dan fauna Riau.

“Padahal ini adalah pesta rakyat Riau, bukan pesta milik APP dan APRIL. Mereka tidak layak untuk diberi ruang dan mereka sedang berusaha melakukan green washing, berusaha menutupi dan menyamarkan kejahatannya

Okto Yugo Setiyo
Wakil Koordinator Jikalahari.

11 TAHUN KORPORASI KEBAL HUKUM

Sejak era Presiden SBY-Jokowi: Korporasi HTI kebal hukum. Polisi dan KLHK tak berkitik melawan korporasi HTI. Pernah tersangka, ujungnya SP3.



Sinar Mas Grup
APP Grup kuasai konsesi HTI **953.139** Ha



Raja Garuda Mas/RGE
APRIL Grup kuasai konsesi HTI **1,159,047** Ha.



3. Eka Tjipta Widjaja US\$8,6 miliar (Rp124 triliun)

Tahun ini kekayaan Eka Tjipta (95 tahun) turun US\$500 juta, sehingga Eka Tjipta pun turun ke peringkat tiga.

Kekayaan Eka berasal dari grup Sinar Mas yang bergerak di industri kertas, agrobisnis, telekomunikasi, real estate dan layanan finansial.

20,3 triliun

23. Eddy Katuari: US\$ 1,35 miliar setara Rp 19,6 triliun

24. Djoko Susanto: US\$ 1,33 miliar setara Rp 19,3 triliun

25. Sukanto Tanoto: US\$ 1,3 miliar setara Rp 18,85 triliun

26. Eddy Kusnadi Sariaatmadja: US\$ 1,29 miliar setara Rp 18,71 triliun

27. Ciputra: US\$ 1,2 miliar setara Rp 17,4 triliun